

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)

Iik Sakinah¹, Slamet Muchsin², Suyeno³

*Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jalan MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: sakinahiik@gmail.com*

ABSTRAK

Pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 pasal 1 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Kota Malang sebagai kota inklusi mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2014. Namun implementasi peraturan daerah ini masih belum terlaksana maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas pada point rehabilitasi sosial serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang cukup baik, penyandang disabilitas sudah merasakan rehabilitasi sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Yayasan di Kota Malang. Faktor pendukung implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah Antusias dari keluarga penyandang disabilitas sehingga terbentuk paguyuban, melibatkan secara langsung disabilitas pada kegiatan sosial, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan berbagai instansi lain. Faktor penghambat implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah minimnya pegawai yang menangani rehabilitasi sosial bagi disabilitas, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk disabilitas masih minim, keterbatasan waktu pada rehabilitasi sosial. Dengan temuan penelitian seperti berikut diharapkan bisa memberikan perubahan supaya implementasinya secara optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Disabilitas Kota Malang

Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk mengakui hak – hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 pasal 1 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas, Kota Malang secara resmi mencanangkan program Kota inklusif (Kota ramah disabilitas). Hal tersebut sejalan dengan jumlah disabilitas yang cukup tinggi di Kota Malang. Data BPS tahun 2017 di Kota Malang menunjukkan terdapat 1.529 penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Tujuan diadakannya inklusi yakni menjamin pemerataan, perlindungan dan pemberdayaan hak – hak penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya, dan meminimalisir adanya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Malang.

Program inklusi yang dicanangkan oleh Kota Malang dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pada pasal ke 7 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya disegala aspek kehidupan, meliputi rehabilitasi, pendidikan, pemberdayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni dan budaya, olahraga, hukum dan politik, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Dinas Sosial Kota Malang merupakan salah satu aktor yang bertugas melindungi dan memberdayakan kaum disabilitas. Khususnya pada konteks rehabilitas. Namun, hingga kini potret perlindungan dan pemberdayaan kaum disabilitas di Kota Malang masih menjamur. Persoalan yang dihadapi oleh kaum disabilitas di Kota Malang meliputi beberapa hal, diantaranya: Belum meratanya upaya rehabilitasi fasilitas pendidikan, Terbatasnya sarana dan prasarana umum bagi kaum difabel, Masih adanya perlakuan diskriminasi terhadap kaum disabilitas. Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran di bidang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas
 - b. Sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sama atau hampir sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi
Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
 - b. Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
 - c. Bagi Peneliti
Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Kajian Teori

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomasdye dalam Subarsono (2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah yakni pemerintah daerah membentuk suatu pembagian daerah yang dikelompokkan atas daerah besar dan daerah kecil, yang kemudian daerah tersebut berwenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri karena dianggap paham akan

karakteristik dan permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu daerah sehingga penanganannya akan lebih mudah dan efektif dan juga tepat sasaran

Disabilitas

Pada pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya.

Tipe-tipe disabilitas:

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, parelegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, grahita dan *down syndrome*
- c. Pendandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku. Antara lain:
 - Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
 - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial sepertiautis dan hiperaktif
- d. Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas wicara.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk memfungsikan dan mengembangkan kembali kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.

Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, sosial yang berupa:

- a. Motivasi dan diagnose psikososial
- b. Bimbingan mental
- c. Bimbingan fisik
- d. Bimbingan sosial
- e. Bimbingan keterampilan
- f. Terapi penunjang
- g. Bimbingan resosialisasi
- h. Bimbingan dan pembinaan usaha
- i. Bimbingan lanjut

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang) menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif*.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti, Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Menurut Moleong (2011:152), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan focus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan focus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusi fakta masuk – keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil, dengan fokus sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas pada rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kota Malang
2. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Malang dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas pada point rehabilitasi sosial
3. Pengaruh peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdaan penyandang disabilitas pada

penyelenggaraan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di Kota Malang

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Malang pada umumnya dan Dinas Sosial pada khususnya terhadap rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Wawancara, Observasi Dokumentasi

Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Malang

Dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada poin rehabilitasi sosial. Berikut akan dipaparkan hasil dan pembahasan penelitiannya :

a. Identifikasi Kedisabilitasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, Untuk menjamin terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kota Malang, maka langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan melakukan pencatatan atau pendataan penyandang disabilitas (*assessment*). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan bagi penyandang disabilitas, sehingga nantinya program maupun kegiatan terkait disabilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. *assessment* merupakan langkah awal untuk pendataan penyandang disabilitas meliputi pencatatan biodata seraf pencatatan hasil pengamatan gejala kedisabilitasan.

b. Identifikasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya kegiatan *assessment* penyandang disabilitas terdapat kegiatan yang diantaranya pengidentifikasian tentang kedisabilitasan dan kebutuhan – kebutuhan disabilitas. Pengidentifikasian disabilitas mencatat diantaranya tentang jenis disabilitas yang disandang, pengamatan gejala – gejala disabilitas dan pengukuran terhadap tingkat disabilitas, pernah mendapatkan rehabilitasi atau belum sama sekali dan lain sebagainya. Sedangkan pengidentifikasian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas ialah berdasarkan catatan hasil *assessment*, seperti

kebutuhan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas rungu tingkatan ringan dan sedang atau alat bantu gerak seperti tongkat atau kursi roda bagi penyandang disabilitas daksa kaki dan lain sebagainya. Terkait dari hasil identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas juga dijadikan sebagai pendukung rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas, sehingga rehabilitasi sosial yang dilakukan tepat.

c. Pemberian Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

1. Motivasi

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengenai motivasi pada poin rehabilitasi bagi penyandang disabilitas motivasi dan diagnose psikososial belum diimplementasikan dengan maksimal karena tidak semua penyandang disabilitas di Kota Malang mendapatkan fasilitas rehabilitasi sosial khususnya motivasi hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran bagi penyandang disabilitas dan juga kurangnya pemahaman implementator terhadap peraturan daerah tentang rehabilitasi sosial yang diimplementasikan.

2. Bimbingan Mental

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat diketahui bahwa bimbingan mental yang diberikan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas masih terbatas, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan waktu, dan juga disabilitas yang mempunyai karakteristik permasalahan khusus sehingga memerlukan bimbingan setiap hari.

3. Bimbingan Fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwasanya bimbingan fisik sudah diimplementasikan dengan baik karena sudah dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan. Namun kurang maksimal karena rehabilitasi sosial membutuhkan penanganan yang rutin dilakukan setiap hari.

4. Bimbingan Sosial

Menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti baik wawancara ataupun observasi,

bahwasanya bimbingan fisik sudah diimplementasikan dengan baik karena sudah dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan. Namun kurang maksimal karena rehabilitasi sosial membutuhkan penanganan yang rutin dilakukan setiap hari.

5. Bimbingan Keterampilan

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, dapat diketahui bahwasanya bimbingan keterampilan sudah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah karena fasilitasi terapi khususnya bimbingan keterampilan tidak hanya dilakukan di lembaga disabilitas saja, Namun bimbingan keterampilan dilaksanakan di Kecamatan. Sehingga disabilitas yang tidak termasuk dalam lembaga disabilitas bisa mendapatkan bimbingan keterampilan meskipun pelaksanaannya tidak dilakukan setiap hari.

6. Terapi Penunjang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terapi penunjang sudah diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Malang. Namun, dalam penerapannya tidak bisa dilakukan secara intens. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran untuk rehabilitasi sosial.

7. Bimbingan Resosialisasi

Menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, Bimbingan resosialisasi diberikan setelah mendapatkan bimbingan vokasional, dan bimbingan semacamnya di panti – panti yang sudah bekerjasama dengan dinas sosial Kota Malang dengan menggunakan dana APBD. Bimbingan resosialisasi merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas di Kota Malang. bimbingan resosialisasi sudah diberikan kepada penyandang disabilitas yang sudah melalui tahapan – tahapan rujukan

rehabilitasi sosial yang sudah diberikan oleh dinas sosial Kota Malang dengan menggunakan dana APBD. Selain itu, manfaat bimbingan resosialisasi juga sangat dirasakan juga didukung oleh masyarakat dengan antusiasnya

8. Bimbingan dan Pembinaan Usaha

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti Salah satu pembinaan usaha yang diberikan oleh dinas sosial Kota Malang terhadap penyandang disabilitas yakni UEP (Usaha Ekonomi Kreatif). dalam perealisasi point pembinaan usaha sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang, pemerintah sudah memberikan fasilitas pada penyandang disabilitas yaknidengan mengadakan UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) yang diikuti oleh penyandang disabilitas dewasa atau dimulai dari usia 18 tahun. Sistematika pelaksanaan UEP berdasarkan hasil assessment terbaru lalu para penyandang dikumpulkan untuk melakukan pengisian lembar monitoring baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang masih belum mempunyai usaha. Dari hasil monitoring ini dapat diketahui capaian dan rencana – rencana usaha bagi disabilitas dan dapat menjadibahan pertimbangan pada monitoring selanjutnya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Bagi Pnyandang Disabilitas

a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Bagi Pnyandang Disabilitas

1. Keluarga Disabilitas

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Keluarga penyandang disabilitas di Kota Malang sangat antusias dalam mendukung program rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang. Hal tersebut dibuktikan dari terbentuknya paguyuban – paguyuban bagi penyandang disabilitas yang berada di lima kecamatan di Kota Malang, meliputi paguyuban Lentera

Kasih di Kecamatan Blimbing, paguyuban Mutiara Kasih di Kecamatan Kedungkandang dan lainnya.

2. Inovasi Dinas Sosial

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pemerintah Kota Malang mempunyai banyak inovasi dalam perealisasi rehabilitasi sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas ini. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara melibatkan langsung penyandang disabilitas pada kegiatan sosial, selain itu pelaksanaan terapi setiap bulannya juga tidak dilaksanakan di kantor Dinas Sosial maupun di yayasan disabilitas melainkan dilaksanakan di kantor kecamatan masing-masing. Menurut Ibu Layli Qodariyah selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan keberadaan disabilitas pada pemerintah Daerah/Kecamatan

3. Kerjasama

Rehabilitasi sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan pendapat Ibu Layli Qodariyah selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat bahwa penanganan penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Malang saja melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengimplementasian rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan beberapa yayasan dan beberapa paguyuban yang berada di Kota Malang yakni Yayasan Putra Pancasila, Yayasan Bhakti Luhur, UPT ABK, Diknas dan Kecamatan dan lainnya. Kerjasama yang dilakukan seperti dalam pelaksanaan program assessment, bimbingan vokasional dan beberapa kerjasama lainnya.

b. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

1. Pegawai

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Selama program

kegiatan dalam upaya rehabilitasi sosial tentunya tidak akan terlepas dari faktor penghambat implementasi perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pegawai dari dinas sosial Kota Malang yang masih belum memadai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan terapi yang dilakukan setiap bulan oleh dinas sosial Kota Malang pada setiap kecamatan diberlakukan sistem kuota. Jadi, tidak semua disabilitas memperoleh terapi setiap bulannya melainkan dengan sistem bergilir.

2. Anggaran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Anggaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti jumlah anggaran yang dilokasikan untuk disabilitas masih minim. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Layli Qodariyah selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat bahwasanya seluruh anggaran dari APBD bukan hanya untuk disabilitas saja melainkan harus dibagi dengan dua puluh dua PMKS yang lain.

3. Keterbatasan Waktu

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menurut penjelasan yang diberikan oleh Ibu Suci selaku Waka Kurikulum Yayasan Putra Pancasila membutuhkan terapi yang berkelanjutan yang artinya terapi tersebut seharusnya dilakukan setiap hari. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti penyandang disabilitas mendapatkan terapi hanya setiap satu bulan sekali dengan sistem giliran. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Layli Qodariyah selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat bahwasanya pemerintah Kota Malang memang minim waktu yang digunakan untuk rehabilitasi penyandang disabilitas karena masih banyak PMKS yang harus ditangani.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang

Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Malang dengan menggunakan tolak ukur Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kota Malang. Program rehabilitasi telah terlaksana cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya 9 bentuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan baik, antara lain yaitu terapi bagi penyandang disabilitas yang rutin dilakukan setiap bulannya, terapi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang sudah tercatat pada data assessment yang diperbarui setiap bulan sekali. Selain itu, terdapat UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas pada masyarakat yang lain, kegiatan UEP ini dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan kegiatan yakni mengisi lembar monitoring dan evaluasi usaha oleh penyandang disabilitas yang akan digunakan untuk keberlanjutan usaha bagi disabilitas.

Selain itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Malang melakukan rujukan di beberapa lembaga resmi pemerintah baik tingkat provinsi maupun nasional untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial di Kota Malang karena keterbatasan alat, Dinas Sosial juga melibatkan LSM yang membantu pelaksanaan rehabilitasi sosial agar pelaksanaannya lebih merata.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat dalam Mengetahui Keluhan Pasien di RSUD dr Soedomo Trenggalek.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi layanan pengaduan keluhan di RSUD dr Soedomo Kabupaten Trenggalek antara lain adalah :

- Faktor pendukung implementasi : lingkungan kerja yang kondusif yang ditandai dengan bersih dan nyamannya

kondisi di dalam ruangan UPM RSUD Trenggalek, motivasi kerja yang tinggi ditandai dengan adanya keinginan melayani masyarakat sepenuh hati, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni yang ditandai dengan kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada pasien yang menyampaikan keluhan serta disiplin kerja yang tinggi yang ditandai diterapkannya *fingerprint* setiap datang dan sebelum pulang dari kantor sesuai jam yang berlaku.

- Faktor penghambat implementasi : kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan ditandai dengan ukuran ruangan UPM RSUD Trenggalek yang kecil dan lokasinya yang kurang strategis selain itu juga kurangnya pamflet atau bagan yang menjelaskan mengenai persyaratan pengaduan dan kurangnya jumlah pegawai yang ada yang ditandai dengan jumlah pegawai yang hanya satu dan jauh dari kata ideal yang dikhawatirkan implementasi UPM kurang berjalan secara optimal

Daftar Pustaka

- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Karya
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service).
- Sumber Jurnal dan Skripsi**
- Adhitya Bagas Pratama. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Sarana Prasarana Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Perpustakaan Yogyakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Arie Purnomosidie. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Surakarta. Vol.1 No. 2
- Herwin Eka Pramadi. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan*

- Pemenuhan Hak – Hak Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta..* Fakultas Dakwah dan Komunika. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Monica Furi Demirza. 2016. *Implementasi Disability Policy Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang.* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.
- M, Syafie. 2014. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.* INKLUSI, Vol.1 No.2
- Sandra Fitriyana. 2018. *Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta.* Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Annisa Rahmayani. 2018. *Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Sholeh.* Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
- Undang – undang nomor 19 tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas